

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

FANDRIYANTO BANGGA

NIM : S.115178

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN
MARISA KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

FANDRIYANTO BANGGA**S.2115178****SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
una memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2021

PEMBIMBING I

Edy Sijaya, S.IP., M.Si
NIDN : 0904078103

PEMBIMBING II

Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si
NIDN : 0904068201

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BOTUBILOTAHU KECAMATAN
MARISA KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

FANDRIYANTO BANGGA

NIM : S2115178

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Mei 2021

KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya , S.IP.,MSi.
2. Iskandar Ibrahim, S.Ip,. M,Si.
3. Dr.Gretty Sy. Saleh, S.IP.,M,Si
4. Dr.Dra. Hj. Rusni Djafar. M.PA
5. Umar Songga Sune, S.Ip,. M.Si

MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2021

Yang membuat Pernyataan



FANDRIYANTO BANGGA

ABSTRAK

Fadriyanto Bangga. S.115178, 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato serta Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, BPD dan tokoh masyarakat, desa Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa kabupaten pohuwato. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah “*Purposive Sampling*” dengan harapan bahwa informan dan responden yang dipilih mewakili populasi. Data dianalisis secara kualitatif dibantu dengan tabel frekuensi, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dengan intensitas jawaban responden pada “sering” yaitu 19 (54,28%), Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, jawaban responden “sering” yaitu 19 (54,28%), Partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dengan intensitas jawaban responden “jarang” yaitu 23 (65,71 %), Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban responden “tidak pernah” yaitu 18 (51,42%). Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa terdiri dari : Faktor Pendukung yaitu kesediaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, tingkat pendidikan masyarakat, faktor pengarahan pemerintah desa dan pemberian kesempatan dan peluang bagi masyarakat, dan faktor Penghambat yaitu fasilitas atau peralatan yang tersedia dan faktor tingkat pendapatan masyarakat.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pelaksanaan Pembangunan



ABSTRACT

Fadriyanto Proud. S.115178, 2021. Community Participation in the Implementation of Development in Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency).

The purpose of this study was to determine community participation in the implementation of development in Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency and what factors influenced the implementation of development participation in Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency. The method in this research is descriptive with a quantitative approach. The population in this study were the village head, village secretary, village apparatus, BPD and community leaders, the village of Botubilotahu Village, Marisa District, Pohuwato Regency. While the method used in sampling is "Purposive Sampling" with the hope that the selected informants and respondents represent the population. The data were analyzed qualitatively with the help of a frequency table, according to the number of variables used as indicators in this study. The results showed that community participation was in the form of ideas or thoughts, with the intensity of respondents' answers to "often" which was 19 (54.28%), community participation in the form of energy, respondents' answers to "often" were 19 (54.28%), participation in in the form of money or material, with the intensity of respondents' answers "rarely" namely 23 (65.71 %), participation in the form of evaluating development results, respondents' answers "never" ie 18 (51.42%). Then the factors that influence participation in the implementation of development in the village of Botubilotahu Village, Marisa District, consist of: Supporting Factors namely public awareness to participate, community education level, village government directing factors and providing opportunities and opportunities for the community, and Inhibiting Factors namely facilities or available equipment and community income level factors.

Keywords: Community Participation, Implementation of Development



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

JANGAN TUMBANG DI CACI MAKI, DAN JANGAN TERBANG DI PUJI-PUJI
(FANDI)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ibudan dan ayahanda yang selalu memberikan kasih sayangnya secara tulus serta doanya yang selalu teriring dalam menempuh bahtera kehidupan dan perkuliahan ini. Tanpa mereka saya tidak bisa seperti sekarang ini, tanpa mereka saya tidak bisa berdiri kokoh disini, maka dari itu saya sangat mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus dan support yang luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik
- Teruntuk kakakku Yuyanda Bangga terima kasih atas dukungan dan motivasinya saya berhasil sampai ketahap ini
- Dan paling istimewa buat keluarga kecilku yang selalu mendoakanku dan mensupport aku didalam keadaan apapun, dan berkat mereka aku bisa mencapai kesuksesan ini.
- Dosen pembimbing saya yang paling baik dan bijaksana, terima kasih karena telah menjadi orang tua saya dikampus. Terima kasih atas bantuannya, nasihatnya dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO TEMPAT
AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul. ***Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato***. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Adapun Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Edy Sijaya, S.IP.,M.SI dan Bapak Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal sampai dengan penyusunan skripsi.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan motivasi bagi kesuksesan penulis.
8. Terisitimewa keluarga kecilku istri dan anaku yang menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Masyarakat.....	11
2.1.1. Unsur-unsur Masyarakat.....	12
2.1.2. Kriteria Masyarakat Yang Baik	13
2.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat	14
2.2.1. Bentuk-Bentuk Partispasi.....	17
2.2.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Demokratisasi	19
2.2.3. Prinsip-Prinsip Demokratisasi Dalam Partisipasi Masyarakat.....	20
2.2.4. Indikator Demokratisasi Dalam Melihat Partisipasi Masyarakat.....	22
2.3. Pengertian Pembangunan.....	25
2.4. Pengertian Desa	27
2.5. Kerangka Pemikiran	31

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian	35
3.2. Desain Penelitian	35
3.3. Definisi Operasional Variabel	36
3.4. Populasi dan Sampel	37
3.5. Jenis dan Sumber Data	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	38
3.7. Teknik Analisa Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa	37
4.1.2. Visi Misi Desa Botubilotahu	39
4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Botubilotahu.....	40
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Botubilotahu	42
4.1.5. Karakteristik Responden	47
4.2. Hasil Penelitian Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu	51
4.2.1. Partisipasi Dalam Bentuk Ide atau Pikiran	52
4.2.2. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga	55
4.2.3. Partisipasi Dalam Bentuk Uang Atau Materi	57
4.2.4. Partisipasi Dalam Bentuk Mengevaluasi	59
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bulili	61
4.3.1. Faktor Pendukung.....	61
4.3.2. Faktor Penghambat.....	67

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Usia Responden	47
Tabel 4.2 : Jenis Kelamin Responden	48
Tabel 4.3 : Tingkat Pendidikan Responden	49
Tabel 4.4 : Menurut Pekerjaan Responden	50
Tabel 4.5 : Partisipasi Responden Dalam bentuk Ide atau Pikiran	53
Tabel 4.6 : Frekuensi Responden Mengikuti Rapat Desa	54
Tabel 4.7 : Partisipasi Responden Dalam Bentuk Tenaga	56
Tabel 4.8 : Partisipasi Responden Dalam Bentuk Uang atau Materi	58
Tabel 4.9 : Partisipasi Responden Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Dèsa Botubilotahu	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pernyataan

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Dari Lemlit

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Dari Lokasi

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 6 : Similarity Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistemik, bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen warga bangsa. Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan demokratisasi masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti *pertama* sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; *kedua* sebagai program dan *ketiga* sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan catatan statistik diketahui bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk

mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Otonomi desa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki arti bahwa desa mampu berinisiatif atau berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, dan tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Desa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki arti bahwa :
 ”Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui demokratisasi masyarakat. Demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa. Dalam lingkungan dimana budaya demokratisasi masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat.

Semakin melembaganya demokratisasi masyarakat desa dalam pembangunan akan bermuara pada swakelola desa secara mandiri. Konsep demokratisasi yang di maksud disini adalah partisipasi langsung oleh masyarakat

dengan mandiri. Meskipun demikian, konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang sempit dan statis, sekedar menempatkan kemampuan masyarakat desa untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks demokratisasi disini adalah partisipasi masyarakat secara mandiri dengan keswadayaan, yang mengandung arti yang luas daripada sekedar perimbangan tanggung jawab pembiayaan pembangunan. Konsep mandiri berarti perimbangan kekuatan antara masyarakat desa dan negara dalam menentukan arah tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal. Strategi lain adalah melakukan tekanan secara politik terhadap institusi-institusi lokal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang menyangkut fungsional kinerja mereka. Tekanan ini dimaksudkan untuk mendorong perbaikan-perbaikan pada kinerja institusi-institusi formal tersebut agar mampu merespon, merencanakan serta melaksanakan aspirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat.

Demokratisasi yang mengarah pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ini mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek

pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat desa yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh melalui penelitian yang berjudul : *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang diperlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu pemerintahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Dan sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut partisipasi dalam demokratisasi pelaksanaan pembangunan desa Botubilotahu

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai suatu acuan bagi pemerintah desa dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu satuan sosial dari sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah *society*, sedangkan masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta atau demokratisasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah ilmiahnya berinteraksi. Ada beberapa pengertian masyarakat :

Menurut Selo Somardjan (1974:64), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Menurut Koentjaraningrat (1994:22) , masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Menurut Ralph Linton (1968:231) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial.

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama,

tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.

2.1.1 Unsur-unsur Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto Alam, masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

2.1.2. Kriteria Masyarakat Yang Baik

Menurut Marion Levy (Brata I Nyoman. 1982:137) diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat :

1. Ada sistem tindakan utama.
2. Saling setia pada sistem tindakan utama.
3. Mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota.
4. Sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran / reproduksi manusia.

Masyarakat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini, tetapi adanya perkembangan yang dimulai dari masa lampau sampai saat sekarang ini dan

terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut. Masyarakat ini kemudian berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga kemajuan yang dimiliki masyarakat sejalan dengan perubahan yang terjadi secara global, tetapi ada pula masyarakat yang berkembang tidak seperti mengikuti perubahan zaman melainkan berubah sesuai dengan konsep mereka tentang perubahan itu sendiri.

Dalam mempertahankan kehidupannya, masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun adaptasi tersebut dibedakan sebagai berikut:

- a. Adaptasi genetik; setiap lingkungan hidup biasanya merangsang penghuninya untuk membentuk struktur tubuh yang spesifik, yang bersifat turun temurun dan permanen
- b. Adaptasi somatis yang merupakan penyesuaian secara struktural atau fungsional yang sifatnya sementara (tidak turun temurun). Bila dibandingkan dengan makhluk lainnya, maka manusia mempunyai daya adaptasi yang relatif lebih besar.

2.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan, orang akan menemukan rumusan pengertian yang cukup bervariasi, sejalan dengan luasnya

lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Sutoro (1999:64) misalnya menginventarisasi adanya enam tafsiran yang berbeda tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk menggunakan hal itu;
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampakdampak social;
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Apabila mencermati pola pikir yang digunakan dalam menginventarisasi cara partisipasi tersebut, maka dapat dipahami bahwa partisipasi dalam perencanaan lebih dimaksudkan dalam rangka memperoleh masukan tentang kondisi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat setempat. Masukan tersebut dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari masyarakat dan

merupakan hal yang dianggap penting bagi perumasan perencanaan terlepas dari apakah yang merumuskan perencanaan tersebut masyarakat sendiri atau bukan.

Memperhatikan beberapa pengertian partisipasi dan cara untuk mewujudkannya seperti yang sudah diuraikan tadi, tampak bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Dengan demikian, apabila latarbelakang yang mendorong keterlibatan dimasukkan sebagai kriteria, maka variasi pengertian partisipasi tadi akan lebih mengerucut. Beberapa pihak mencoba merumuskan pengertian partisipasi dengan memasukkan kedua kriteria tersebut. Dengan menggunakan kedua kriteria tersebut partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi dan kesadarannya tentang arti keterlibatannya tersebut. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak di dorong oleh determinasi dan kesadaran, hal tersebut tidak masuk dalam kategori partisipasi melainkan lebih tepat disebut sebagai mobilisasi. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil.

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktifitas lokal berikutnya. Dari sudut pandang yang lain,

partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, dilain pihak juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada fisik materiil.

2.2.1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (1988:16), bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang;
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga;
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat;
5. Sumbangan dalam bentuk kerja;
6. Aksi massa;
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga;
8. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Menurut Kumorotomo (1992:136) secara umum corak partisipasi warga

Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation). Ini merupakan corak partisipasi yang paling mudah dilihat karena biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi massadalamhal ini ditujukan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideology pembangunan tertentu.
2. Partisipasi kelompok (group participation) warga Negara bergabung dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencurahkan aspirasi mereka.
3. Kontak warga Negara dan pemerintah (citizen government contacting) proses komunikasi dapat terjalin antar warga Negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelepon atau pertemuan secara pribadi. Kontak juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga.
4. Partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seorang warga Negara didalam pembuatan kebijakan pemerintah.

Dan uraian diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk partisipasi bagi warga Negara yang diantaranya paling mudah dilihat adalah partisipasi dalam pemilihan yang ada di desa-desa.

Sedangkan Ndraha (1983: 125) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi antara lain yakni :

1. Ide atau Pikiran : Ide atau pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan

menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

2. Tenaga: merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan
3. Uang: merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas..
4. Partisipasi dalam menilai pembangunan atau melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan.

Dan uraian tersebut terlihat bahwa segala macam bentuk partisipasi yang bisa disajikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

2.2.2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Demokratisasi

Dalam pembangunan Demokratisasi berarti usaha yang terorganisir dari berbagai pihak (perempuan atau laki-laki) dan kelompok dimiskinkan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya dan struktur/organisasi (FADO, 2001). Dengan demikian, konsep demokratisasi merupakan serangkaian kegiatan yang

sistematis dan terstruktur dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengambil inisiatif, pengambilan keputusan, menetapkan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada padanya.

Beberapa alasan mengapa Partisipasi menjadi isu penting dalam demokratisasi berbasis masyarakat. Para ahli dan praktisi berbeda pandangan tentang kontekstualitas dan tatanan praktis demokratisasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa kasus muncul terkait dengan slogan partisipasi yang digunakan untuk memformulasikan suatu tindakan dan dukungan terhadap suatu kebijakan dan rencana pengembangan yang mungkin penolakan dan perdebatan dikalangan bawah (grassroot). Oleh karena itu, dilakukan upaya legitimasi dan pelibatan semua sebagian elemen masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan itu. Hal ini disebabkan pemahaman yang tidak tepat tentang partisipasi dikalangan pengambil kebijakan. Perlunya orientasi bagi para pemimpin, tokoh masyarakat, staf pemerintahan, aktivis LSM dan lembaga terkait lainnya untuk menyepakati kembali makna partisipasi dalam pembangunan.

2.2.3. Prinsip-Prinsip Demokratisasi Dalam Partisipasi Masyarakat

Bukan sesuatu hal yang mudah untuk menerapkan kata demokratisasi dengan kaitan partisipasi pada lingkungan masyarakat tertentu. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik sangat berpengaruh, menyebabkan formalisasi demokratisasi termasuk dalam partisipasi menjadi sangat bervariasi satu dengan lainnya. Tidak ada satu formulasi yang baku tentang konsep demokratisasi ini. Kata ini, mengandung suatu yang bergerak dinamis dalam suatu

proses belajar. Demokratisasi yang mengarah ke partisipasi masyarakat dengan dasar beberapa prinsip diantaranya;

1. Kebersamaan

Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Pelembagaan demokratisasi dalam partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horisontal. partisipasi tumbuh melalui kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengendalian program pembangunan.

2. Tumbuh dari bawah

Partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas ke bawah “top down” atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan. Partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Partisipasi merupakan suatu proses pelembagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program.

3. Kepercayaan dan keterbukaan

Kunci sukses Demokratisasi dalam partisipasi masyarakat adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar ‘saling percaya’ dan ‘keterbukaan’. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses demokratisasi

berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat. Sebagai contoh kasus penanganan hama terpadu (PHT), tidak dapat menunggu instruksi atau program yang direncanakan oleh Departemen Pertanian, tetapi harus segera ditangani dengan mengeliminasi sejauh mungkin kerugian yang lebih parah dengan pengambilan inisiatif dari petani sendiri dengan cara yang dianggap sesuai. Demokratisasi mendorong hubungan lebih terbuka antara berbagai pihak baik pejabat pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat.

Untuk tumbuh dan berkembang, demokratisasi diwujudkan dalam pemahaman bahwa partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat-prasyarat atau elemen-elemen yang memuat dalam konsep demokratisasi. Kotler menyebutkan beberapa elemen/prasyarat demokratisasi dikaitkan dengan partisipasi masyarakat yang selalu dijumpai dalam setiap pembangunan yaitu Tujuan (*cause*), lembaga pengubah (*change agent*), dan sasaran yang akan diubah (*change target*).

Tjokroamidjojo (1992:88) membagi demokratisasi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- a. Partisipasi dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah
- b. Partisipasi dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- c. Partisipasi dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

2.2.4. Indikator Demokratisasi Dalam Melihat Partisipasi Masyarakat

Dalam membantu identifikasi tingkat demokratisasi dalam melihat partisipasi masyarakat, diperlukan alat ukur atau indikator sebagai kunci pernyataan tentang hasil dan harapan dari tujuan yang ditetapkan bersama. Indikator dibabak berdasarkan empat katagori yang menunjukkan tingkat demokratisasi (FADO, 2001) yaitu ;

1. Penerima hasil atau pemanfaat program
2. Pelaksanaan proyek
3. Pengaruh proyek atau kontrol partisipan dan,
4. Akses terhadap pengambilan keputusan.

Secara rinci keempat kategori ini diuraikan sebagai berikut;

1. Penerima hasil atau pemanfaat program
 - a. Masyarakat menerima semua manfaat program
 - b. Masyarakat menerima hanya sebagian dari manfaat program yang diharapkan.
 - c. Hanya kalangan atau kelompok masyarakat tertentu (misalnya kelompok yang melek huruf atau berpendidikan) yang menerima semua manfaat dari proyek yang diharapkan.
 - d. Hanya beberapa orang atau kelompok saja (misalnya laki-laki) menerima hanya sebagian manfaat proyek yang diharapkan (misalnya, bibit tanpa pupuk).
 - e. Tidak ada masyarakat yang menerima manfaat program yang diharapkan.
2. Pelaksanaan program

- a. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan tenaga kerja saja yang dibutuhkan program.
 - b. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan seluruh biaya yang dibutuhkan program.
 - c. Masyarakat baik perempuan atau laki-laki memberikan sumbangan berupa tenaga kerja dan material saja yang dibutuhkan program.
 - d. Masyarakat menyumbang sebagian tenaga kerja, biaya, dan material yang dibutuhkan program.
 - e. Hanya beberapa kalangan atau kelompok tertentu saja yang menyumbang tenaga kerja, biaya dan material.
3. Pengaruh program atau kontrol masyarakat
- a. Masyarakat diberi informasi oleh para pengambil keputusan pada tahap identifikasi, desain, pelaksanaan, dan evaluasi program.
 - b. Masyarakat yang terlibat dikonsultasikan oleh para pengambil kebijakan pada seluruh tahap proses pembangunan.
 - c. Masyarakat meninjau kembali semua proses pengambilan keputusan tentang program pembangunan.
 - d. Masyarakat melakukan modifikasi atau menolak keputusan pada semua tahap proses program.
 - e. Hanya beberapa kelompok (misalnya, tokoh masyarakat) yang memiliki kesempatan mendapatkan informasi, diajak berkonsultasi, meninjau dan menolak keputusan.

- f. Masyarakat mengambil kesempatan yang ada untuk menguji, menilai dan mengkritik hasil program pembangunan.
 - g. Hanya beberapa kelompok atau elemen tertentu yang mengambil kesempatan yang ada untuk menguji, menilai dan mengkritik hasil program pembangunan.
4. Akses terhadap mekanisme pengambilan keputusan
- a. Masyarakat terdiri dari anggota unit atau organ pengambilan keputusan yang bertanggungjawab terhadap proses identifikasi, desain, pelaksanaan dan evaluasi program.
 - b. Masyarakat baik laki-laki atau perempuan menduduki posisi pelaksana unit pengambilan keputusan.
 - c. Hanya beberapa kelompok atau kalangan tertentu saja yang menduduki posisi pelaksana unit pengambilan keputusan.
 - d. Hanya beberapa posisi unit pengambilan keputusan tertentu saja yang diduduki oleh masyarakat.
 - e. Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu perkumpulan sukarela yang bertanggungjawab untuk berlanjutnya program pembangunan.
 - f. Seluruh elemen yang ada dalam masyarakat merupakan anggota suatu perkumpulan yang didirikan untuk membangun dan memelihara keberlanjutan program.

2.3. Pengertian Pembangunan

Hakekat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang diinginkan. Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain :

Ginanjar Kartasasmita, (Daldjoeni, 1985 : 43) secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan Sondang P Siagian, (Daldjoeni, 1985 : 44) mendefenisikan pembangunan sebagai :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.

Defenisi di atas memberikan penjelasan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik daripada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya Menurut Wrihatnolo (Maskun, 1993,29) pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum.

Brata dalam bukunya “*Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*” mengemukakan arti pembangunan adalah :

“Pembangunan desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan respon yang antusias itu dapat terjamin”.

Terlepas dari adanya perbedaan persepsi tentang konsep pembangunan oleh para ilmuwan, tetapi ide pokok dalam konsep pembangunan secara umum adalah :

1. Pembangunan adalah proses, proses berarti suatu kegiatan yang terjadi secara terus menerus dilaksanakan
2. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Artinya jika ada suatu kegiatan yang kelihatannya sebagai suatu pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembangunan
3. Pembangunan dilakukan secara berencana
4. Pembangunan mengarah pada modernitas, yakni cara hidup yang baru dan lebih baik daripada yang sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

2.4. Pengertian Desa

Desa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki arti bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam perkembangannya pengertian desa selalu mengalami perubahan, seperti yang tercantum pada pengertian Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang berbunyi :

”Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (Brata, I Nyoman, 1982 : 57) desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Menurut Bintaro (Brata, I Nyoman, 1982 : 59) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sedang menurut Paul H. Landis (Brata, I Nyoman, 1982 : 60) desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut :

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan

Dalam kamus sosiologi kata tradisional dari bahasa Inggris, *Tradition* artinya Adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi, bahwa pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya. Yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebetulnya desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti mengentaskan rakyat miskin, mengubah wajah fisik desa, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa, hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih modern. Sayangnya sederet tujuan tersebut mandek diatas kertas.

Karena pada kenyataannya desa sekedar dijadikan obyek pembangunan, yang keuntungannya direngguk oleh aktor yang melaksanakan pembangunan di desa tersebut bisa elit kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Di desa, pembangunan fisik menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Karena itu, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang ada sejak tahun 2000 dan secara teoritis memberi kesempatan pada desa untuk menentukan arah pembangunan dengan menggunakan dana PPK, orientasi penggunaan danayapun lebih untuk pembangunan fisik.

Menyimak realitas diatas, memang benar bahwa yang selama ini terjadi sesungguhnya adalah “pembangunan di desa” dan bukan pembangunan untuk, dari dan oleh desa. Kalaupun derap pembangunan merupakan sebuah program yang diterapkan sampai ke desa-desa, alangkah baiknya jika menerapkan konsep ”membangun desa, menumbuhkan kota”. Konsep ini, meski sudah sering dilontarkan oleh banyak kalangan, tetapi belum dituangkan ke dalam buku yang khusus dan lengkap. Inilah tantangan yang harus segera dijawab.

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi “Talcot Parsons” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
- b. *Orientasi kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- c. *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja.
- d. *Askripsi* yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan.
- e. *Kekabaran (diffuseness)*. Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu.

Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

2.5. Kerangka Pemikiran

Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan serta ikut berperan serta dalam pembangunan. Pembangunan sangat ditentukan oleh adanya pengertian, kesadaran dan demokratisasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat. Diperlukan keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi kemudian mengolah semua potensi yang dimiliki oleh desa, agar dapat tercipta pembangunan desa yang maksimal. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya berdemokratisasi aktif dari seluruh masyarakat.

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan demokratisasi masyarakat (*participatory democracy*).

Berikut definisi demokratisasi yang dikemukakan oleh Charly seperti dikutip Ndraha (1992:73) :

“Demokratisasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya”.

Dari makna pengertian demokratisasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokratisasi adalah keterlibatan mental dan juga emosi seseorang yang

tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya, dan karena ingin berhasil sepenuhnya atas setiap kegiatan yang dilakukan maka akan menimbulkan rasa memiliki dan ikut menyumbang serta bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

Berbicara tentang keterlibatan mental dan fisik, berarti membicarakan pengorbanan tentang konsep berpartisipasi seseorang. Dalam konteks demokratisasi masyarakat ada beberapa bentuk yang dapat disalurkan guna memberi apresiasi pembangunan desa, antara lain dengan adanya partisipasi pemberian ide atau pendapat, partisipasi dalam bentuk uang atau bentuk materi lainnya, partisipasi dalam bentuk tenaga (fisik), serta partisipasi dalam bagaimana mengevaluasi hasil akhir pembangunan desa.

Pembangunan yang efektif apabila dalam penentuan perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan pelaksanaan pembangunan yang turut diikutsertakan masyarakat.

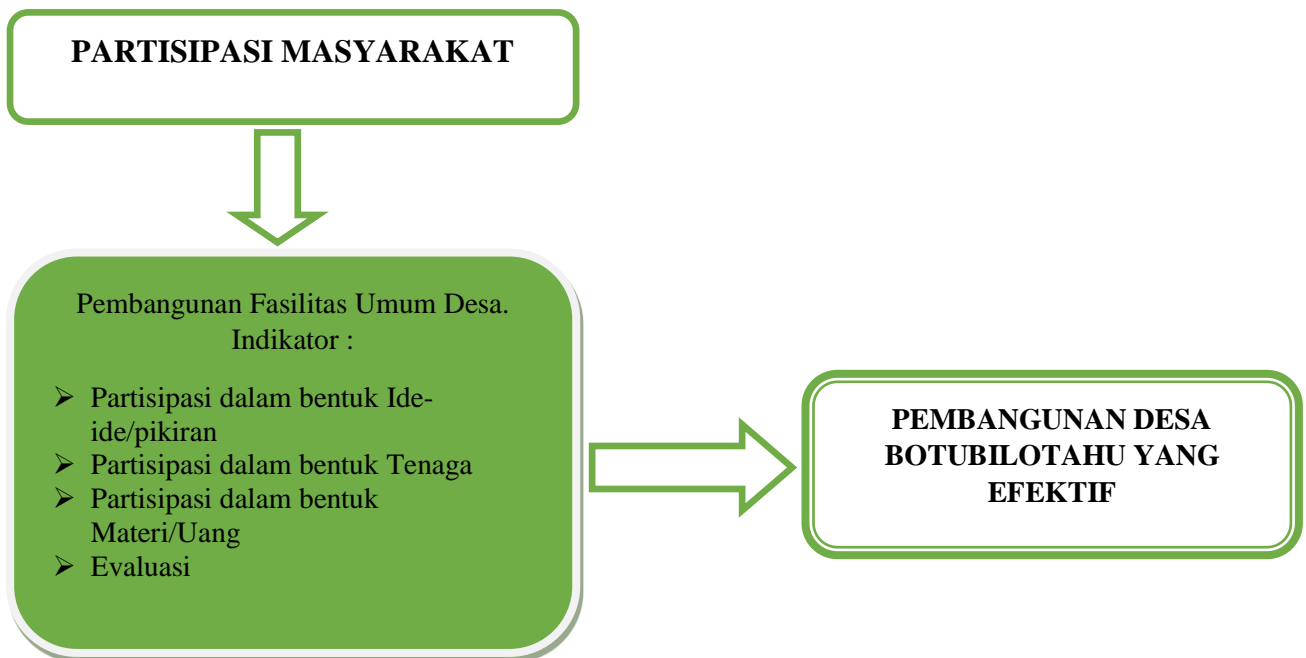
Keberhasilan suatu pembangunan desa harus senantiasa beriringan dengan bagaimana menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam menunjang pembangunan desa, tetapi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tidak begitu saja tumbuh dengan sendirinya, melainkan pemerintah harus aktif untuk terus mendorong dan meningkatkan demokratisasi dalam partisipasi masyarakat desa dalam Pembangunan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor internal berupa kesadaran/kemauan masyarakat dalam diri, tingkat pendidikan masyarakat, dan pendapatan atau penghasilan masyarakat serta faktor

eksternal berupa kepemimpinan/peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat, kesempatan serta fasilitas yang tersedia.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini untuk mencapai target perlu ditunjang oleh kebijaksanaan pemerintah sehingga keterpaduan antara keduanya akan menjadi satu kesatuan yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan dan akan mewujudkan pembangunan desa yang demokratis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Talizidhuhu Ndraha, 1983:125

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Lokasi Penelitian ini bertempat di di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato direncanakan selama 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain dan tipe deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dengan maksud menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menginterpretasi masalah yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan, berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung ke lokasi penelitian.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Partisipasi anggota masyarakat desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik di desa, mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, sampai evaluasi pembangunan. Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan pada pembangunan fisik infrastruktur Jalan desa dan tani di desa Botubilotahu dengan Indikator yang digunakan adalah :

- Partisipasi dalam bentuk Ide atau Pikiran,
- Partisipasi dalam bentuk Tenaga,
- Partisipasi dalam bentuk Uang/materi,
- Partisipasi dalam Mengevaluasi hasil pembangunan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam hal ini adalah hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi demokratisasi masyarakat dalam pembangunan, baik itu berupa penghambat (faktor penghambat) maupun yang mendukung partisipasi ini (faktor pendukung). Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Faktor Pendukung

- Faktor kesadaran masyarakat
- Tingkat pendidikan masyarakat
- Peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat
- Kesempatan atau peluang masyarakat

2) Faktor Penghambat

- Fasilitas atau peralatan
- Tingkat pendapatan atau penghasilan masyarakat

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan komponen yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, BPD dan tokoh masyarakat, Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa kabupaten pohuwato.

3.4.2. Sampel,

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*Purposive Sampling*” dengan harapan bahwa informan dan responden yang dipilih mewakili populasi. Dalam menentukan sampel digunakan teknik Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

- Informan :
 - Pemerintah desa botubilotahu sebanyak 8 orang
 - Tokoh Masyarakat sebanyak 5 orang

- Responden, terdiri dari :
 - Tokoh masyarakat, sebanyak 5 orang
 - Kalangan pendidik , sebanyak 5 orang
 - Tokoh Agama, sebanyak 5 orang
 - Warga desa Botubilotahu sebanyak 20 orang

Jumlah keseluruhan Responden 35 orang

3.5. Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan tehnik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realiable (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau

berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu yang akan diselidiki.

2. Kuesioner yaitu Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Wawancara mendalam, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). Wawancara mendalam dimaksudkan untuk menggali pendapat informan secara mendalam tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Botubilotahu yang sulit diperoleh dengan pengamatan langsung. Klarifikasi data dari informan dilakukan dengan kembali mengamati kebenaran data dengan model observasi untuk kepentingan verifikasi.
1. Studi Kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini.
2. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi ini berupa catatan resmi mengenai Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Botubilotahu .

3.7. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dibantu dengan tabel frekuensi, sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini. Untuk beberapa data tertentu digunakan bantuan data kuantitatif dalam menganalisanya. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Dèsa Botubilotahu Kecamatan Marisa

Pada tahun 1933 tepatnya Jaman Belanda di Marisa yang pada saat itu masih termasuk wilayah Marisa Ke-Kepala Dèsaan Paguat terdapat pertambangan Belanda, tepatnya di kampong Hele (Sekarang Dèsa Hulawa). Satu – satunya jalan menuju lokasi pertambangan tersebut untuk mengangkut perlengkapan pembangunan dari pantai Marisa hanyalah melewati jalan Dèsa Marisa Utara.

Dipertengahan jalan tepatnya di pusat Dèsa Marisa Utara terdapat sebuah batu besar yang menutupi jalan sehingga tidak dapat di lalui oleh orang – orang Belanda. Untuk tidak menghalangi jalan mereka, Batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan dinamik. Merekapun berhasil memecahkan batu itu dan jalanpun terbuka.

Sejak saat itulah terbentuklah perkembangan baru dengan sebutan ***Botubilotahu*** yang sering disebut Batu Pasang. Pada tahun 2002, dengan memperhatikan kriteria yang ada. Pemerintah setempat mengadakan Perencanaan tentang Pemekaran Dèsa. Yang pada tahun 2003 Pemekaran tersebut terjadi. Dèsa pemekaran ini akhirnya resmi dimekarkan dan diberi nama “**Dèsa Botubilotahu**”. Dan nama Batu Pasang sekarang ini sudah menjadi nama dusun di Dèsa Marisa Utara Kecamatan Marisa.

A. Sejarah Tokoh/Pemimpin Dèsa Botubilotahu

**Nama-nama Kepala D sa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya D sa Botubilotahu**

No	Periode	Nama Kepala D�sa	Lama Menjabat	KET.
1	2003 - 2004	PAKAYA SULEMAN	2 Tahun	Plh
2	2004 - 2008	HAMID ISHAK	5 Tahun	Definiti
3	2009 - 2014	ONE MBUINGA	6 Tahun	Definiti
4	2015 - 2016	RONALD IDRUS,S.Sos	1 Tahun	Plh
5	2016 - 2022	ONE MBUINGA	6 Tahun	Definiti

Sumber : RPJM D sa Botubilotahu 2021

B. Sejarah Pembangunan D sa

Tabel Sejarah Pembangunan D sa

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan kantor d�sa	2004	BANDES
2	Pembangunan gedung SD (I)	1977	APBD
3	Pembangunan gedung SD (II)	1977	APBD
4	Pembangunan mesjid Nurul Iman	1962	SWADAYA
5	Pembangunan masjid AT-TAQWA	1953	SWADAYA
6	Pembangunan Mesjid AT-TAUHID	2007	SWADAYA
7	Pembangunan mesjid Al- Muhajirin	2003	SWADAYA
8	Pembangunan mesjid Nur-HIKMAH	2012	SWADAYA
9	Pembangunan TK- CERIA	2012	PNPM
10	Pembangunan TK-	2013	PNPM
11	Rumah Kumuh 12 Unit	2006-2007	APBD
12	Rumah Kumuh 15 Unit	2009-2014	APBD
13	Rumah Rehabilitasi 6 Unit	2013	
14	Rumah sehat 3 Unit	2015	APBD
15	Pembangunan SMP 2 N. Marisa	2005	APBD
16	Pembangunan Perpustakaan	2011	PNPM MPd
17	Pembangunan TPQ	2013	APBD
18	Pembangunan lapangan		APBD
19	Pembangunan Posyandu	2011	PNPM
20	Pembangunan KB. LAKI-LAKI	2013	APBD
21	MCK Umum 10 Unit	2009-2011	PNPM Mpd
22	MCK UMUM 6 Unit	2015	APBD
23	Pembangunan PAUD KB-ILOPONU	2011	APBD
24	Pembangunan RSUD	2003	APBD

Sumber : RPJM D sa Botubilotahu 2021

4.1.2. Visi dan Misi Dèsa Botubilotahu

1) Visi

Visi dèsa botubilotahu adalah : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Adil, Bertanggung Jawab Dan Madani

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Mewujudkan : Terkandung di dalamnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Dèsa Botubilotahu yang mandiri secara ekonomi.

Pemerintahan : Satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah Dèsa Botubilotahu.

Bersih : tidak memungut kepada masyarakat tentang administarasi pembayaran kecuali yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang..

Adil : di setiap Kepemimpinan harus di dasari dengan sikap adil dalam mengambil suatu keputusan dalam bermasyarakat maupun dalam Pelayanan.

Bertanggung jawab : pemimpin dalam kondisi apapun harus tetap bertanggung jawab dalam pemerintahannya.

Madani : dalam Visi, Misi Pak bupati, kepala dèsa menyelaraskan visi,misi pak bupati. Yakni madani.

2) Misi Dèsa Botubilotahu

Misi D sa Botubilotahu merupakan turunan dari Visi D sa Botubilotahu. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi D sa Botubilotahu merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi. Dan merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran D sa yang hendak dicapai. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi D sa Botubilotahu terutama lebih mendekatkan diri kepada Pelayanan Masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah D sa Botubilotahu

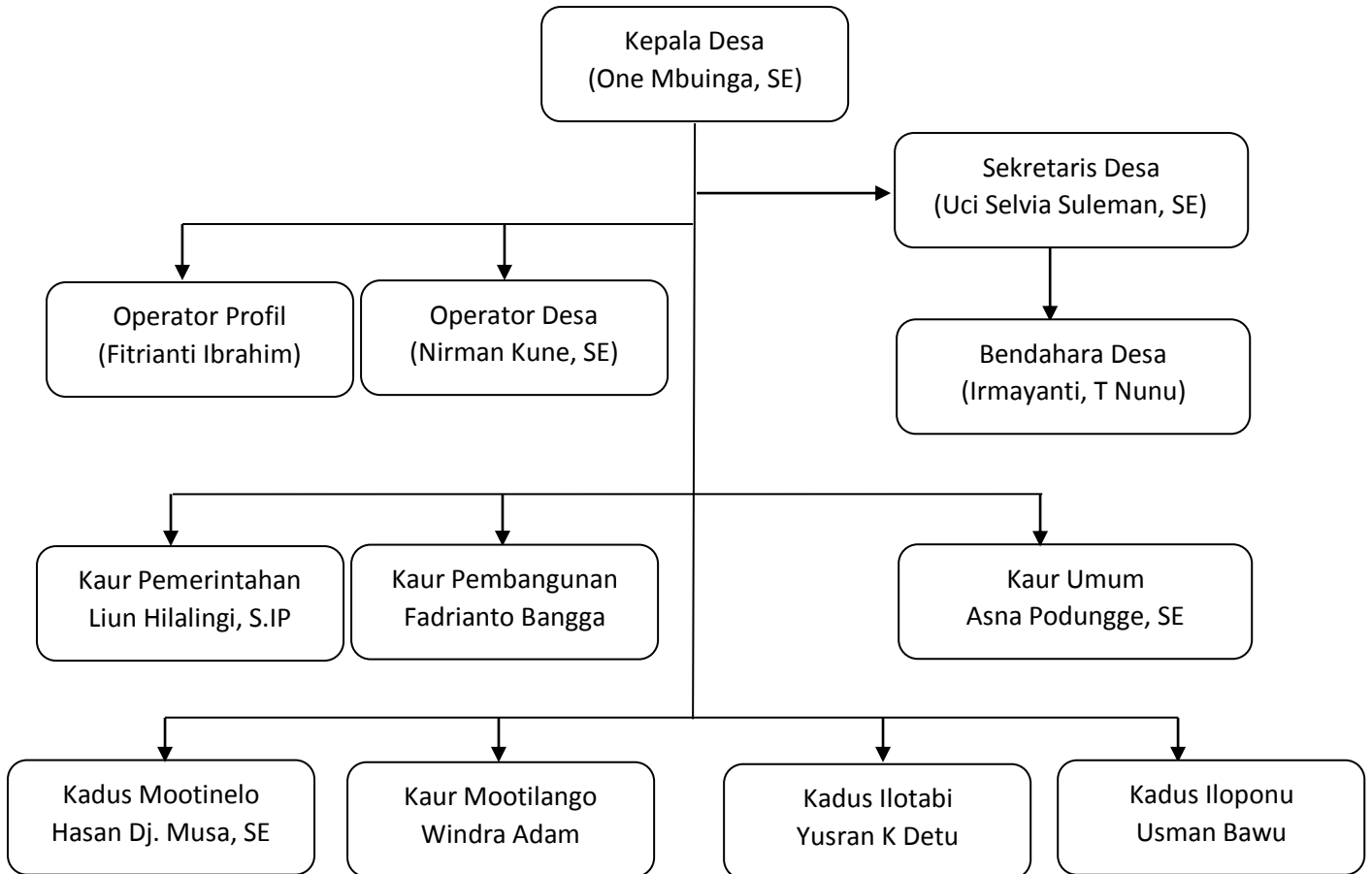
Struktur Pemerintah D sa

No	Nama	Jabatan	Usia	Masa Jabatan	Pend.
1	One Mbuinga, SE	Kepala D�sa	40 thn	2016 - 2022	S1
2	Uci Selvia Suleman	Sekretaris D�sa	25 thn	2015 - skrg	S1
3	Irmayanti t. Nunu	Bendahara	21 thn	2016	SLTA
4	Liun Hilalingo	Kaur Pemerintahan	24 thn	2015 – skrg	S1
5	Fandriyanto Bangga	Kaur Pembangunan	19 thn	2016	SLTA
6	Asma Podungge	Kaur Umum	37 thn	2015 – skrg	S1
7	Hasna Dj Musa	Kepala Dusun Mootinelo	27 thn	2015 – skrg	S1
8	Windra Adam	Kepala Dusun Mootilango	thn	2015 - skrg	Paket C
9	Yusran k. Detu	Kepala Dusun Ilotabi	thn	2015- Skrng	Paket C
10	Usman Bau	Kepala Dusun Iloponu	thn	2015- Skrng	SLTA

Sumber : RPJM D sa Botubilotahu 2021

Adapun bagan struktur Organisasi Pemerintah D sa Botubilotahu di gambarkan seperti di bawah ini :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Dèsa Botubilotahu



Sumber : RPMJDes Botubilotahu 2021

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Dèsa

Tugas dan fungsi pemerintahan dèsa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

A. Kepala Dèsa

1. Tugas kepala dèsa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dèsa (RPJM Dèsa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Dèsa (RKP Dèsa)
- Mensosialisasikan RKP Dèsa, APB Dèsa dan rencana kerja kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dèsa mempunyai Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dèsa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Dèsa.
- Menetapkan Peraturan Dèsa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Dèsa mengenai APB Dèsa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat dèsa
- Membina perekonomian dèsa
- Mengkoordinasikan pembangunan dèsa secara partisipatif;

- Mewakili dësanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Dësà mempunyai Kewajiban :
- Memegang teguh dan mengasmalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan dësà yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan dësà;
 - Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan administrasi pemerintahan dësà yang baik
 - Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dësà;
 - Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan dësà;
 - Mendamaikan perselisihan masyarakat di dësà

- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan dèsa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di dèsa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

B. Sekretaris Dèsa

Sekretaris Dèsa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan dèsa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah dèsa dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Dèsa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala dèsa apabila kepala dèsa berhalangan.

C. Bendahara Dèsa

Bendahara dèsa adalah unsur staf sekretariat dèsa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan dèsa. Bendahara dèsa merupakan bagian dari PTPKD. PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dèsa merupakan unsur perangkat dèsa yang membantu Kepala

Désa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan désa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan désa dan pengeluaran pendapatan désa dalam rangka pelaksanaan APBDésa. Bendahara Désa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Désa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Désa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

D. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala désa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan désa.
- Membantu sekretaris désa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Désa baik menyangkut rancangan Peraturan Désa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan désa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala désa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan désa setiap tahun

E. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Dèsa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat dèsa
- Membantu membina perekonomian dèsa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala dèsa baik menyangkut rancangan peraturan dèsa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan dèsa;
- Penggalan dan pemanfaatan potensi dèsa.

F. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusa umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala dèsa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat dèsa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

G. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala dèsa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- pelaksana kebijakan kepala desa

4.1.6. Karakteristik Responden

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa teknik penarikan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, maka pemilihan sampel responden telah dilakukan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 35 orang. Ke-35 orang tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi umur, pendidikan, maupun pekerjaan.

1. Usia Responden

Karakteristik responden menurut usia secara terperinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Menurut Umur

Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
20 – 29 Tahun	7	20,00
30 – 39 Tahun	10	28,57
40 – 49 Tahun	12	34,28
50 – 59 Tahun	4	11,42
≥60 Tahun	2	5,71
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, November 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa komposisi yang mendominasi pada penelitian ini yaitu pada usia 40-49 tahun yaitu sebesar 34,28 %, selanjutnya responden pada usia 30-39 tahun yaitu sebesar 28,57 %, sedangkan pada usia ≥60 Tahun adalah responden yang paling sedikit yaitu sebesar 5,71 %.

Usia 40-49 merupakan frekuensi yang paling banyak di lokasi penelitian. Peneliti mendapatkan bahwa pada usia ini, pengetahuan masyarakat desa terbilang sudah tinggi, dan sesuai dengan metode pengambilan sampel, *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta dianggap mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

2. Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	26	74,28
2.	Perempuan	9	25,71
Jumlah		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, November 2021

Berdasarkan komposisi responden pada jenis kelamin, responden pada laki-laki sebesar 74,28 % atau 26 orang, sedangkan pada perempuan sebesar 25,71 % atau 9 orang.

Berdasarkan rasio diatas, jumlah responden laki-laki merupakan yang paling banyak, hal ini didasari karena responden laki-laki selalu bergelut dengan aktivitas keseharian jadi lebih mengetahui tentang permasalahan. Sedangkan perempuan merupakan pekerja pasif di rumah.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang utama dalam pencapaian hasil penelitian ini. Tingkat pendidikan pada responden sangat berpengaruh pada kemampuan memberikan informasi terkait dengan objek

penelitian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan dapat melihat serta memahami persoalan yang dibutuhkan dalam pembangunan di desa.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi(f)	Persentase(%)
1	Tidak sekolah/tidak tamat SD	3	8,57
2	SD/ sederajat tamat	2	7,89
3	SLTP/ sederajat tamat	10	23,68
4	SMA/ sederajat tamat	11	34,21
5	Diploma tamat	5	15,78
6	S1 tamat	4	18,42
7	S2 Tamat	0	0,00
Jumlah		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, November 2021

Pada tabel diatas 4.3 dapat dilihat adanya tingkat perbedaan responden. Dari seluruh responden tingkat pendidikan SMA/ sederajat mendominasi dengan 11 orang atau sebesar 34,21 %, SLTP/ sederajat dengan 10 orang atau 23,68 %, Diploma 5 orang atau sebesar 15,78%, lalu Sarjana strata satu 4 orang atau 18,42%

Dari penjelasan di atas dapat dilihat tingkat pendidikan di Desa Botubilotahu masih tergolong baik, adapun responden tamatan SMA, Diploma, Sarjana adalah yang paling banyak didominasi mereka yang bekerja sebagai PNS, guru status PNS, dan guru status Honorer. SLTP dan SD adalah mereka sekarang bekerja sebagai petani dan berkebun. Dalam penelitian ini, peneliti tidak

menemukan responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Jadi bisa dikatakan pendidikan pada Desa Botubilotahu masih tergolong baik.

4. Pekerjaan

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Pedagang	3	8,57
2	Petani	18	51,42
3	PNS	2	5,71
4	Guru Pns/honoror	6	17,14
5	Wiraswasta	3	8,57
6	Lainnya	3	8,57
Jumlah		35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, November 2021

Berdasarkan tabel 4.4, pekerjaan yang paling banyak adalah petani dengan 18 orang atau 51,42%, Guru status PNS/Honoror 6 orang atau 17,14%, Wiraswasta dan Lainnya masing masing 3 orang atau 8,57%, PNS di Instansi lain 2 orang atau 5,71%. Pekerjaan lain yang dimaksud disini terbagi atas beberapa antara lain IRT, penyadap,serta sopir.

Sesuai dengan teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yang dilakukan secara “*Purposive Sampling*” maka peneliti sengaja mempetakan responden agar dapat menentukan jawaban yang bisa diharapkan dalam pengembangan penelitian ini dengan harapan bahwa responden akan mampu memberikan informasi dan data-data yang akurat.

4.2. Hasil Penelitian Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu

Proses pembangunan dan pengembangan masyarakat, terutama pembangunan desa sesungguhnya dapat dimulai secara sederhana, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara alamiah mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena itu setiap upaya pembangunan harus mempertimbangkan potensi lokal dan dinamika masyarakat.

Pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengubah cara berpikir, menggali kesadaran baru, membebaskan diri dari berbagai sistem yang menjerat dan yang lebih utama lagi dapat menemukan kembali rasa percaya diri. Selama ini banyak program pembangunan yang *bersifat top-down* atau *blue-print* berambisi membuat kegiatan besar dan mahal yang disusun dan dirancang, tanpa mendengarkan dan menggali aspirasi masyarakat sehingga inisiatif masyarakat kurang berkembang dan tidak adanya rasa memiliki oleh masyarakat itu terhadap hasil pembangunan. Banyak sekali hasil pembangunan yang tak terurus dan terlantar karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat untuk merawat karena segi manfaat yang rendah.

Penyertaan masyarakat dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, program bahkan sampai pada pemantauan kegiatan akan menumbuhkan kesadaran individu akan pentingnya keikutsertaan dalam proses pembangunan dan akan menghilangkan apatisme pembangunan. Menggali informasi kebutuhan

dan potensi yang dimiliki untuk menentukan skala prioritas secara bersama menghasilkan sasaran pembangunan yang tepat.

Partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan dapat berupa, Partisipasi dalam bentuk ide, Partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang/materi dan partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan. Berikut dapat dilihat penjelasan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam demokratisasi pembangunan di Desa Botubilotahu yaitu:

4.2.1. Partisipasi Dalam Bentuk Ide atau Pikiran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak terbatas pada pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyumbang ide/pikiran serta proses pengambilan keputusan dan pemilihan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan semacam itu memungkinkan masyarakat secara luas berpartisipasi dalam pelaksanaannya, juga dapat mendatangkan sisi positif yang lain.

Sisi positif yang lainnya tersebut adalah tersalurnya aspirasi serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta terbinanya kreativitas dan inisiatif warga masyarakat untuk ikut menentukan suatu program pembangunan yang bermanfaat, karena pembangunan sesungguhnya di tujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat desa, pembangunan adalah merupakan tanggungjawab pemerintah desa namun pemerintah desa tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pembangunan tersebut secara sepenuhnya apabila tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dalam pelaksanaannya terkhusus di Desa Botubilotahu dilakukan dengan pertemuan formal dan Informal antara

masyarakat dan pemerintah desa dalam membahas dan mencari solusi dan menentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dapat disajikan seperti pada tabel 4.6 dibawah ini :

Tabel 4.5
Partisipasi Responden Dalam bentuk Ide atau Pikiran

Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Selalu	2	5,71
Sering	19	54,28
Jarang	11	31,42
Tidak Pernah	3	8,57
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Maret 2021

Bedasarkan pada tabel 4.6 di atas jumlah responden dalam partisipasi bentuk ide yang menjawab Sering adalah 19 orang atau 54,28 %, jarang Sebesar 11 orang atau 31,42%. Hal ini di kemukakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Botubilotahu , (LH) mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat sering menyumbangkan ide dalam pembangunan apalagi disinggung membahas suatu masalah yang mendesak di Desa Botubilotahu , itupun tidak selalu dalam bentuk rapat di kantor desa. Kebanyakan di saat waktu senggang, misalnya di acara-acara desa”.
(Wawancara Maret 2021).

Pengembangan partisipasi ide/pikiran, dikaji dalam dua penyaluran aspirasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk formal dimana dilakukan dalam rapat-rapat desa atau pertemuan formal lainnya. Berhubung tidak semua masyarakat ikut dalam rapat desa maka pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan diluar forum formal dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan di

tingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat demi pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan.

Partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan ide/pikiran tidak selalu mudah dilaksanakan. Berikut disajikan dalam tabel 4.7 frekuensi responden dalam mengikuti rapat desa atau pertemuan lainnya. Jumlah jawaban responden yang paling banyak adalah mengatakan ”jarang” mengikuti rapat desa atau pertemuan lainnya yaitu 21 orang atau 60,00 %, sedangkan yang menjawab tidak pernah 8 orang atau 22,85 %.

Berdasarkan tabel 4.7 di bawah ini dapat dilihat frekuensi responden dalam mengikuti rapat desa sangat kurang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu, masyarakat mempunyai kesibukan lain dan juga karena mereka tidak diundang dalam menghadiri rapat desa.

Tabel 4.6
Frekuensi Responden Mengikuti Rapat Desa
Atau Pertemuan Lainnya

Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Selalu	1	2,85
Sering	5	14,28
Jarang	21	60,00
Tidak Pernah	8	22,85
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Maret 2021

Berdasarkan Wawancara dengan kepala Desa Botubilotahu bapak (OM) mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pertemuan formal (rapat desa) tidak semua elemen masyarakat diundang dalam mengikuti rapat desa, yang diundang hanya Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Anggota BPD dan Perwakilan masyarakat (Kepala Dusun)”(wawancara Maret 2021).

Sependapat dengan Kepala Desa Botubilotahu, Kepala Dusun Mootinelo (HM) mengatakan bahwa :

“Memang seluruh warga tidak di Undang, dengan pertimbangan masyarakat mempunyai kesibukan masing-masing. Kalau dalam penyampaian aspirasi, bisa melalui BPD atau kepala dusun masing-masing, nanti ketua kepala dusun atau BPD yang sampaikan dalam suatu Rapat Desa“. (wawancara Maret 2021).

Sesuai dengan penjelasan kepala Desa Botubilotahu , tidak ada larangan bagi masyarakat untuk ikut dalam rapat. Asumsi bahwa hanya beberapa elemen yang diundang didasarkan bahwa tokoh masyarakat, kepala dusun, anggota BPD dan kepala dusun adalah karena mereka sebagai perwakilan masyarakat desa itu, disamping karena mereka memiliki kemampuan untuk menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

4.2.2. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikutsertaannya mereka rela untuk tidak pergi ke sawah atau ke kebun. Hal ini di kemukakan (MA) Tokoh Masyarakat, bahwa :

“Kalau memang tenaga saya dibutuhkan, dan jika tidak ada pekerjaan yang mendesak, Insya Allah saya akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai yang diamanahkan pemerintah Desa Botubilotahu ”. (Wawancara Maret 2021).

Bentuk partisipasi semacam ini merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan. Umumnya mereka semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga demikian ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Hal ini di ungkapkan oleh kepala dusun Ilotabi, (YD) dalam wawancara di rumahnya mengatakan bahwa :

“Kita di dusun popaseda, memang sudah mengatur jadwal kerja bakti untuk pembangunan fasilitas umum khususnya jalan desa yang melintasi dusun ini. Kita ambil hari sabtu pagi sesuai kesepakatan warga dengan mempertimbangkan waktu yang diambil adalah waktu yang luang sehingga masyarakat bisa turun langsung ikut berpartisipasi”.
(wawancara Maret 2021).

Jika saja usul ataupun tidak bisa menyumbangkan tenaganya, biasanya masyarakat memberikan ganti rugi yang berwujud pemberian makan ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang ada, seperti yang di lakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, yang berkumpul bersama-sama untuk membuat kue dan minuman untuk masyarakat yang ikut melaksanakan pembangunan.

Bentuk tenaga sangat aktif dimana responden yang menjawab ”sering” sebanyak 19 orang atau 54,28 % dan 3 orang responden yang menjawab jarang atau 8,57 %. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab tidak pernah.

Tabel 4.7
Partisipasi Responden Dalam Bentuk Tenaga

Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Selalu	13	37,14
Sering	19	54,28
Jarang	3	8,57
Tidak Pernah	0	0
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Maret 2021

Dari tabel 4.8 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga terbilang baik, adapun keinginan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong (gotong royong) masih sangat erat. Hal ini juga di kemukakan kepala dusun Iloponu, (UB) mengatakan bahwa:

“Memang kalau masyarakat disini, bisa dikatakan kompak kalau ada kerja bakti, gotong royong atau semacamnya, utamanya fasilitas umum seperti rehab mesjid yang akan kita kerjakan. Masyarakat akan terjun langsung dengan kita selalu memberi pemahaman bahwa fasilitas umum ini, kita semua yang akan memakainya.”
(wawancara Maret 2021)

Responden yang menjawab ”sering dan sangat sering” sebagian besar beralasan karena itu merupakan kewajiban bersama dan merupakan bentuk partisipasi yang mudah tanpa mengeluarkan uang, adapun responden yang menjawab merasa malu jika tidak ikut ambil bagian dalam menyumbangkan tenaganya. Dari beberapa alasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Botubilotahu dalam mengikuti partisipasi dalam bentuk partisipasi tenaga masih tinggi. Adapun responden yang menjawab ”jarang” disebabkan karena punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak tahu.

Berikut kutipan Kepala dusun Mootilango, (WA) tentang partisipasi dalam bentuk tenaga :

”Untuk Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan hal yang bisa masyarakat sini berikan untuk pembangunan Desa Botubilotahu karena, jika diminta memberikan yang lain misalnya dalam bentuk uang, sangat susah bagi masyarakat.
(wawancara Maret 2021)

4.2.3. Partisipasi Dalam Bentuk Uang Atau Materi

Dari sisi partisipasi yang lain, adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan bentuk uang ataupun material (bahan bangunan). Selama ini dana-dana pembangunan yang ada adalah secara swadaya dan APBD. Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabenenya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial, seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan.

Tabel 4.8 : Partisipasi Responden Dalam Bentuk Uang atau Materi

Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Selalu	0	0
Sering	3	8,57
Jarang	23	65,71
Tidak Pernah	9	25,71
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Maret 2021

Dari tabel 4.9 diatas tentang partisipasi responden dalam bentuk uang atau materi dapat dilihat bahwa responden yang menjawab ”jarang” dan ”tidak pernah” menempati peringkat terbanyak dimana responden yang menjawab ”jarang” sebanyak 23 orang atau 65,71% dan ”tidak pernah” sebanyak 9 orang atau 25,71%.

Tingkat partisipasi dalam bentuk uang atau materi sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat dimana responden yang menjawab ”jarang” dan ”tidak pernah” beralasan karena memiliki keuangan yang tidak memungkinkan untuk disumbangkan. dan memiliki kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi. Sedangkan responden yang menjawab ”sering” umumnya lebih condong ke arah menyumbangkan materi. Hal ini dibenarkan oleh Sekertaris Desa, (US), mengatakan :

“Kita dari pemerintah desa, memang tidak paksakan sumbangan berupa uang, apalagi dari segi penghasilan masyarakat Bulili kurang mendukung, karena umumnya masyarakat disini adalah petani”. (wawancara Maret 2021)

Sependapat dengan sekertaris desa, (MU) tokoh masyarakat yang juga Petani di Desa Botubilotahu , mengatakan bahwa :

“Sangat jarang kita menyumbang dalam bentuk uang secara langsung, apalagi diantara kami kebanyakan petani saja, akhir akhir ini juga, biasanya kita hanya menyumbang dalam bentuk tenaga apabila tenaga kami dibutuhkan”. (wawancara Maret 2021).

4.2.4. Partisipasi Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan

Bentuk partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan merupakan sesuatu yang penting, dimana masyarakat dapat melihat bagaimana hasil dari pembangunan itu sendiri, sesuai atau tidak dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hasil dari evaluasi ini diharapkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam menentukan pembangunan selanjutnya.

Tetapi terkadang selama ini, sering terjadi *discomunication* antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada, sehingga yang terjadi adalah pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan

keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya, masyarakat juga tidak mengerti betul apa sebetulnya kemauan pemerintah. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena selama ini komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa adalah cenderung berlangsung satu arah. Dampak dari pola komunikasi semacam ini masih terjadi hingga sekarang (Rogers: 1982; Alwi Dahlan: 1980; Rondinelli: 1985). Kondisi ini sesuai dengan yang ungkapkan oleh (YL) masyarakat setempat, dalam kutipan wawancara mengatakan :

”Kita sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan, tapi kadang pembangunan yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mau diapalagi, kalau pembangunan sudah terlanjur terlaksana, dari pada tidak ada sama sekali, lebih baik kita syukuri saja apa yang ada”.

(wawancara Maret 2021).

Berikut disajikan partisipasi responden dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan seperti pada tabel 4.10 dibawah ini. Hasil pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden pada umumnya menjawab ”jarang” dan ”Tidak pernah” dimana, 13 orang yang menjawab jarang atau 37,14 % dan 18 orang yang menjawab ”tidak pernah” atau 51,42 %.

Tabel 4.9

Partisipasi Responden Dalam Bentuk Mengevaluasi Hasil Pembangunan

Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Selalu	1	2,85
Sering	6	17,14
Jarang	13	37,14
Tidak Pernah	18	51,42
Jumlah	35	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Maret 2021

Kurangnya animo masyarakat desa dalam mengevaluasi hasil pembangunan bukan merupakan indikator pada pencapaian demokratisasi pembangunan tetapi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat kepada

pemerintah. Salah satu penyebab lain adalah kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksanaan pertemuan evaluasi sering kali dilaksanakan masa waktu kerja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala urusan pemerintahan Desa Botubilotahu, (LH), mengatakan bahwa :

“Memang masyarakat disini, kurang perhatiannya untuk ikut rapat evaluasi pembangunan, mereka hanya tau bahwa sudah dilaksanakan pembangunan, setelah itu selesai dan digunakan tanpa memperhatikan tahap evaluasi”.
(wawancara Maret 2021).

Dengan faktor-faktor tersebut, mengakibatkan kurangnya animo untuk mengikut rapat evaluasi dalam setiap pembangunan serta masih acuh dan tak acuhnya masyarakat untuk mengevaluasi suatu pembangunan.

4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Botubilotahu

Partisipasi masyarakat tidak begitu saja dapat muncul dengan sendirinya tetapi harus didorong secara terus menerus agar keinginan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berasal dari Internal dan eksternal masyarakat itu sendiri.

Faktor internal dapat berupa kesadaran/kemauan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, dan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa kepemimpinan/peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta fasilitas atau peralatan yang tersedia. Untuk mengetahui lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Botubilotahu , berikut akan dibahas secara lebih jelas.

4.3.1 Faktor Pendukung

4.3.1.1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam proses pencapaian pembangunan desa dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting dalam pencapaian pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja, tetapi karena adanya faktor yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri. Dengan kesadaran yang muncul, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam merumuskan visi pembangunan desa, dengan begitu tujuan dari pembangunan masyarakat desa dapat terwujud. Berdasarkan penelitian dilapangan didapatkan gambaran bahwa faktor kesadaran masyarakat Desa Botubilotahu terhadap partisipasi karena merupakan suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut berpartisipasi baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan pembangunan. Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh masyarakat adalah karena adanya rasa solidaritas dan sifat kekeluargaan yang masih tinggi sesama warga masyarakat dan ini digunakan untuk saling mengingatkan akan pentingnya pembangunan serta peran pemerintah desa dalam hal ini yaitu selaku motivator dalam pembangunan yang senantiasa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan desa. Indikasi ini memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan relatif tinggi.

4.3.1.2. Faktor Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan

kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. *John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992)*, mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai :

- a) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa,
- b) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan
- c) Untuk meratakan kesempatan dan pendapatan.

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan tingkat pendidikan masyarakat seperti pada tabel 4.3, dimana pada tabel 4.3 yang paling dominan adalah pada tingkatan pendidikan SMA/ sederajat mendominasi dengan 11 orang atau sebesar 34,21 %, berbeda tipis pada tingkat SLTP/ sederajat dengan 10 orang atau 23,68 %, Diploma dengan 5 orang atau 15,78 %, Sarjana dengan 6 orang atau 15,78 %, dan SD dengan 2 orang atau 7,89 %. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa faktor tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi masyarakat

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah:

- a. Mengembangkan kompetensi individu,
- b. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan
- c. Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan paradigma diatas, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

4.3.1.3. Faktor Pengarahan Dari Pemerintah Desa

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan dengan lingkungan yang memiliki potensi alam yang melimpah, lagi pula pembangunan pedesaan menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu pemerintah seharusnya memberikan perhatian besar dan lebih serius terhadap pembangunan desa.

Peranan pemerintah bertindak sebagai penampung dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Dalam hal ini aparat pemerintah desa sangat dituntut agar memiliki kepekaan serta kemampuan untuk dapat memberi respon, terhadap inisiatif dan keluhan yang berasal dari masyarakat daripada menonjolkan kepentingan mereka sendiri atau beralih pada menjaga kewibawaan. Hal ini di kemukakan oleh kepala Desa Botubilotahu , (OM) mengatakan bahwa :

“Dalam Pembangunan, saya mengarahkan kepada kepala dusun. tentang mekanismenya, nanti kepala dusun yang sampaikan langsung kepada warganya masing-masing tiap dusun, sedangkan dalam masalah masukan ide, Kita selalu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan ide untuk pembangunan desa ini. Bisa disampaikan langsung ke saya pribadi, atau melalui kepala-kepala dusun, nanti kepala dusun yang menyampaikan langsung kepada saya”
(wawancara Maret 2021)

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mau memberikan peran dan tingkat partisipasi yang besar bagi rakyatnya. Dengan tingginya partisipasi, tingkat kontrol masyarakat terhadap kebijakan juga tinggi. Hal ini akan mendorong transparansi dalam setiap proses pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa sangat bergantung kepada peranan pemerintahan desa dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi, tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Pengarahan dan keterlibatan pemerintah desa dalam proses pencapaian pembangunan di desa adalah salah satu yang tidak bisa dipungkiri lagi dimana

pemerintahan desa merupakan pemegang kendali utama pembangunan di desa. Disisi lain masyarakat desa adalah masyarakat yang masih memegang kepatuhan kepada yang dituakan (disegani) di desa seperti, Kepala Desa, kepala Dusun, imam desa dan ketua BPD.

4.3.1.4. Kesempatan Atau Peluang Bagi Masyarakat

Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai pembangunan desa.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu syarat mutlak dalam pencapaian pembangunan yang diinginkan. Salah satu pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam berdemokratisasi adalah berpartisipasi dalam bentuk ide/pikiran dan tahap evaluasi, dalam hal ini masyarakat diundang dalam rapat desa untuk membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh desa dan apa cocok dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa lebih tahu tentang apa yang perlu untuk pembangunan di desa. Selain pemberian ide diharapkan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan, mempelajari kendala yang telah dihadapi agar pembangunan selanjutnya dapat lebih mengena ke masyarakat.

Pencapaian data di atas memberi daya guna positif pada pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Semakin tinggi kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka semakin tinggi juga demokratisasi masyarakat. Pemberian

kesempatan ini kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa, diharapkan memberi stimulus yang besar guna pembangunan selanjutnya.

4.3.2 Faktor Penghambat

4.3.2.1. Faktor Fasilitas Atau Peralatan

Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya. Tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang memadai akan menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah masih kurang memadainya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan dan berbagai kegiatan lainnya.

Kegiatan masyarakat berpartisipasi ini, dipengaruhi oleh ketersediannya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam pertemuan desa/rapat desa akan berjalan lancar jika tersedianya tempat yang digunakan dalam pertemuan tersebut. Peneliti mengambil contoh (berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga) pada saat kantor desa belum diperbaiki masyarakat seakan malas untuk ikut dalam rapat desa tersebut, keadaan kantor desa yang kotor tidak dibersihkan. Hal ini juga bisa mengakibatkan terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat akan tersendat. Hal ini di ungkapkan oleh tokoh masyarakat yang aktif di karang taruna serta mahasiswa (SB) di salah satu perguruan tinggi swasta di pohuwato mengatakan bahwa :

“Selain kesibukan pekerjaan dan kuliah, kondisi kantor yang membuat saya malas kalau di undang rapat dulu sebelum renovasi, fasilitasnya buruk. Setelah renovasi, di sana juga sangat panas karena ruangan kantor desa di tidak difasilitasi dengan pendingin atau kipas angin”.
(wawancara Maret 2021).

Olehnya itu, dari data dan wawancara di atas dapat dilihat faktor fasilitas atau peralatan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan desa. Semakin lengkap fasilitas atau peralatan yang tersedia di desa akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas/peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat kurang.

4.3.2.2. Faktor Tingkat Pendapatan Masyarakat

Penjelasan sebelumnya telah disinggung masalah tingkat pendapatan masyarakat, seperti pada tabel 4.5 dimana responden yang memiliki penghasilan < Rp 500.000 sebesar 18 orang atau 51,42 %, 9 orang atau 25,71 % yang berpenghasilan Rp 500.000-Rp1.000.000, dan 8 orang atau 22,85 % untuk yang berpenghasilan >Rp 1.000.000.

Faktor tingkat pendapatan masyarakat merupakan sesuatu yang urgen, dimana disini bisa dilihat tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Indikator penulis dalam menganalisa pada tingkat pendapatan ini ialah dengan membandingkan jawaban responden antara PNS yang mempunyai penghasilan >Rp 1.000.000 dan petani yang mempunyai penghasilan berkisar <Rp 500.000, saat peneliti melakukan penelitian di Desa Botubilotahu . Berikut kutipan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Botubilotahu (IN) yang berprofesi PNS tentang partisipasi dalam tingkat pendapatan masyarakat :

”Pemberian arahan (evaluasi) dan partisipasi dalam tingkat pendapatan merupakan salah satu indikator yang bisa saya berikan dalam Partisipasi pembangunan desa, karena saya tidak punya terlalu banyak waktu kesibukan saya dalam pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil” (wawancara Maret 2021)

Di samping karena kantor desa dengan jarak tempat tinggal yang jauh menyebabkan partisipasi dalam tingkat pendapatan masyarakat hanya sebatas pemberian evaluasi terhadap hasil pembangunan dan dalam bentuk uang/materi.

Dibandingkan dengan kutipan wawancara diatas, Berikut kutipan wawancara dengan masyarakat (petani) tentang partisipasi dalam tingkat pendapatan masyarakat :

”Kami sebagai petani bisa dikatakan dalam hal pendapatan masih rendah, biaya hidup saja hanya bisa mengandalkan dari hasil pertanian (itupun jika ada), sehingga partisipasi kami dalam pembangunan lebih cenderung ke dalam bentuk tenaga dan ide/fikiran”.
(wawancara Maret 2021)

Dari kedua hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dengan berpendapatan tinggi bisa dikatakan tingkat partisipasinya dalam bentuk uang/materi dan evaluasi terbilang tinggi dibanding dengan masyarakat yang berpendapatan rendah, sebaliknya masyarakat yang berpendapatan rendah bisa dikatakan akan lebih menonjol/cenderung pada partisipasi dalam bentuk tenaga dan dalam bentuk ide/pikiran.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu syarat mutlak dalam pencapaian pembangunan yang diinginkan. Salah satu pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam

berdemokratisasi adalah berpartisipasi dalam bentuk ide/pikiran dan tahap evaluasi, dalam hal ini masyarakat diundang dalam rapat desa untuk membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh desa dan apa cocok dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa lebih tahu tentang apa yang perlu untuk pembangunan di desa. Selain pemberian ide diharapkan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan, mempelajari kendala yang telah dihadapi agar pembangunan selanjutnya dapat lebih mengena ke masyarakat.

Hasil tersebut sejalan dengan teori dalam bukunya Talizinduhu Ndraha (1983: 125) menyatakan bahwa dengan terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena partisipasi aktif masyarakat dalam segala segi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta menikmati hasil pembangunan.

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide atau pikiran, dengan intensitas jawaban responden pada “sering” yaitu 19 (54,28%). Dalam penyaluran aspirasi yang dilakukan kebanyakan pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan di luar forum formal dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat guna pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan.
 - b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, jawaban responden “sering” yaitu 19 (54,28%). Umumnya mereka semuanya ikut terlibat partisipasi bentuk tenaga ini di dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya dilakukan secara gradual ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk tenaga ini adalah merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi.
 - c. Partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dengan intensitas jawaban responden “jarang” yaitu 23 (65,71 %). Tingkat partisipasi dalam bentuk

uang atau materi ini dipengaruhi pada tingkat pendapatan. Responden yang kebanyakan petani dengan penghasilan di bawah Rp.500.000 ini menjawab "jarang" ataupun "tidak pernah" beralasan yaitu memiliki keuangan yang tidak memungkinkan untuk disumbangkan. dan memiliki kebutuhan hidup yang mesti dipenuhi.

- d. Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban responden "tidak pernah" yaitu 18 (51,42%). Yang menjadi indikator utama alasan responden mengatakan tidak pernah adalah kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksanaan pertemuan evaluasi sering kali dilaksanakan masa waktu kerja. Dengan kurangnya pertemuan antara pemerintah Desa Botubilotahu dengan masyarakat Desa Botubilotahu , mengakibatkan sering terjadi discommunication antara pemerintah dengan masyarakat tentang berbagai informasi pembangunan yang ada. Inilah yang membuat pemerintah tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan masyarakat, begitu pula sebaliknya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu terdiri dari :

- a. Faktor Pendukung yaitu kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, tingkat pendidikan masyarakat, faktor pengarahan pemerintah desa dan pemberian kesempatan dan peluang bagi masyarakat.
- b. Faktor Penghambat yaitu fasilitas atau peralatan yang tersedia dan faktor tingkat pendapatan masyarakat.

4.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penguatan demokratisasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Botubilotahu harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Botubilotahu , dimana guna mewujudkan cita-cita pembangunan yakni tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Botubilotahu .
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan, antara lain : (a) Kesadaran masyarakat dengan menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut akan memberikan hasil positif bagi pembangunan desa. (b) Tingkat pendidikan masyarakat dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberi dorongan dan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. (c) Pengarahan pemerintah yaitu pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri (d) Kesempatan atau peluang, hal ini mengidentifikasikan masyarakat perlu dilibatkan dalam partisipasi pembangunan di desa, agar tercipta kesadaran untuk menjaga serta dan merawat hasil pembangunan. (e) Ketersediaan fasilitas atau peralatan, dimana agar masyarakat mempunyai keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Eep Saefulloh, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 1994.
- Fuady, Munir , *Konsep Negara Demokrasi*. Refika aditama, Bandung. 2010.
- Lane, Jan-lane, *Demokratisasi dan Pertumbuhan*, Rajagarafindo persada,2002.
- Dahl, A Robert, *Perihal Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 2011.
- Faried, Ali, *Studi tentang Kebijakan Pemerintahan*. Makassar. 2011.
- Abipraja Soedjono. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Brata, I Nyoman, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Coralie Bryant, Lousie G White., *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1987.
- Daldjoeni N, Suyitno A, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, Alumni, Bandung 1985.
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa*. Penebar Swadaya, Jakarta, 1996.
- Hagul, Peter, *Pembangunan Desa dan Lembaga Sosial Di Pedesaan*, Cetakan I, CV.Rajawali, Jakarta 1985.
- Koentjaraningrat., *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, PT Gramedia Utama, Jakarta 2002.
- Kumorotoma, Wahyudi, 1992, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta Rajawali Press,

- Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Media Widya Mandala, Yogyakarta 1993.
- Ndraha, Talidzuhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* , PT. Asdi Mahasatya, Jakarta 2003.
- Ndraha, Talizidhuhu, 1983. *pembangunan masyarakat desa*, Jakarta : Rireba Cipta.
- Madani, Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Jakarta, 2011.
- Prasadja, Buddy, *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan*, CV Rajawali, jakarta 1980.
- Sastropoetara, R. A. Santoso, 1986. *Partisipasi. Persuasi, dan Disiplin Dalam pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta
- Sjahrir dan Korten, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Soetomo, *Pembangunan Masyarakat (Beberapa Tinjauan Pustaka)*, Liberty Yogyakarta, 1990.
- Sumaryadi Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Sutoro, Eko (ed). 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*. Yogyakarta: APMD Press
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta 2007.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,2003.

DOKUMEN DAN SUMBER LAINNYA

Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah.

DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0821/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : FANDRIYANTO BANGGA
NIM : S2115178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab.
Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI Fadriyanto Bangga. S.115178, 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupate...

May 28, 2021

12516 words / 84594 characters

S2115178

SKRIPSI Fadriyanto Bangga. S.115178, 2021. Partisipasi Masyara...

Sources Overview

29%

OVERALL SIMILARITY

1	ejournal.unsrat.ac.id	5%
2	www.scribd.com	3%
3	marisaselatan.desa.id	3%
4	media.neliti.com	3%
5	eprints.undip.ac.id	2%
6	journal-old.unhas.ac.id	2%
7	repository.unhas.ac.id	1%
8	docobook.com	<1%
9	digilib.unila.ac.id	<1%
10	ojs.uniska-bjm.ac.id	<1%
11	id.scribd.com	<1%
12	referensiagama.blogspot.com	<1%
13	by-boys.blogspot.com	<1%
14	yazhayuadevi.blogspot.com	<1%
15	fr.scribd.com	<1%
16	mnuratria.blogspot.com	<1%

17	popocreations.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	ilhamfalah.wordpress.com	INTERNET	<1%
19	sospol-fisip.blogspot.com	INTERNET	<1%
20	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
21	www.docstoc.com	INTERNET	<1%
22	pps.unud.ac.id	INTERNET	<1%
23	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.ung.ac.id	INTERNET	<1%
25	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
26	jurnal.uniyap.ac.id	INTERNET	<1%
27	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
28	es.scribd.com	INTERNET	<1%
29	filosofisayurasem.blogspot.co.id	INTERNET	<1%
30	rizcarlistyan.wordpress.com	INTERNET	<1%
31	singkil.desa.id	INTERNET	<1%
32	tirto.id	INTERNET	<1%
33	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
34	fatahuddin05.blogspot.com	INTERNET	<1%
35	repository.unair.ac.id	INTERNET	<1%
36	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
37	www.ipdn.ac.id	INTERNET	<1%
38	dokumen.tips	INTERNET	<1%
39	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NamaLengkap :**FANDRIYANTO BANGGA**
2. Nim : S2115178
3. Fakultas : IlmuSosialdanIlmuPolitik
4. Jurusan : IlmuPemerintahan
5. TempatTanggalLahir :Marisa, 05 Juni 1995
6. JenisKelamin :Laki-Laki
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Kawin
9. Nama Suami/istri : Nurmala Ibrahim
10. Anak : 1
11. Alamat :
 - a). Desa : Botubilotahu
 - b). Kecamatan : Marisa
 - c). Kabupaten : Pohuwato
 - d). Provinsi : Gorontalo
- I. Data Keluarga :
Ayah : Karim Bangga
Ibu : KasmaDaulima
- II. Pendidikan :
SD : Tamat tahun 2009
SMP : Tamat tahun 2012
SMK : Tamat tahun 2015
PerguruanTinggi S1 : UniversitasIchsanGorontalo
No. HP : 082291813623



Pohuwato,25 Mei 2021

FANDRIYANTO BANGGA
Nim. S2115178